

ABSTRAK

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Salah satu perkara yang menyita perhatian adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Hakim di sini menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa pidana penjara dan denda, yang mana denda tersebut apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode reduksi data, kategori data, dan display data. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam penjatuhan putusan perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg tidak menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012. Hakim dalam perkara ini mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan dasar hukum diterapkannya pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda pada perkara pelaku Anak. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Tenggara dalam memutus perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg telah mengesampingkan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis.

Kata kunci: Pelatihan Kerja, Pidana Pengganti, Denda, Anak.

ABSTRACT

Criminal offenses against children in conflict with the law should be based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (Law No. 11 of 2012). One of the cases that attracted attention was the case in Tenggara District Court Decision Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg regarding the crime of sexual abuse committed by a child. The judge here imposed criminal sanctions on the defendant in the form of imprisonment and fines, which if not paid will be replaced with confinement. The problem examined in this study is to analyze the application of work training crime as a substitute for criminal fines and legal considerations of judges in deciding cases Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg.

The method of approach used is normative juridical which is qualitative in nature with the legislation and analysis approach. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data processing methods used are data reduction methods, data categories, and data display. Secondary data that has been collected is presented descriptively and analyzed using qualitative analysis.

*The results of this study indicate that the Judge in convicting case number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg did not apply the job training crime as a substitute criminal for a fine as regulated in Article 71 Paragraph (3) of Law no. 11 of 2012. The judge in this case overrides the principle of *lex specialis derogat legi generalis* and in its legal considerations does not explain the legal basis for the application of imprisonment as a substitute for fines in the case of a child offender. Therefore the Tenggara District Court Judge in deciding case Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg has ruled out juridical, philosophical and sociological aspects.*

Keywords: Job Training, Substitute Criminal, Fines, Children.